

Pandangan Ormas Islam terhadap Revitalisasi Pancasila di Ruang Publik: Studi Kasus di Surakarta

Saifuddin

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Email: *saifuddin@uin-suka.ac.id*

Abstrak

Tulisan menggambarkan pandangan ormas-ormas Islam yang ada di Surakarta mengenai revitalisasi Pancasila di ruang publik. Terdapat beberapa klasifikasi pandangan ormas Islam di Surakarta terhadap resonansi Pancasila di ruang publik yang bisa peneliti kemukakan. Klasifikasi pertama adalah ormas Islam yang dapat menerima Pancasila dan secara sungguh-sungguh menyuarakan urgensi Pancasila di ruang publik sebagai ideologi yang final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Klasifikasi kedua adalah ormas Islam yang sudah bisa menerima Pancasila dan menganggapnya sudah final sebagai ideologi berbangsa dan bernegara tetapi cenderung passif untuk menyuarakan Pancasila di ruang publik dan juga diam menghadapi kelompok-kelompok yang anti Pancasila. Klasifikasi ketiga adalah ormas anti Pancasila. termasuk di dalam klasifikasi ini adalah HTI, FPI, MMI, JAT Surakarta.

Kata kunci: *Pancasila, Ruang Publik, Ormas Islam, Surakarta*

Pendahuluan

Pasca reformasi Pancasila banyak dipersoalkan oleh sebagian warga Indonesia dikarenakan terjadi keterpurukan di semua bidang. Dikiranya Pancasila penyebabnya. Bagi mereka Pancasila adalah ideologi yang hampir bankrut, oleh karena itu, mereka mulai menoleh dan melirik ideologi lain di luar Pancasila. Ada yang kemudian melirik agama (baca: Islam—khilafah, daulah islamiyyah, formalisasi syari'ah), ada juga yang melirik ideologi Marxisme bahkan Komunisme, sebagian besar pengen mengadopsi Kapitalisme-Liberalisme. Padahal ideologi-ideologi tersebut tidak cocok untuk bangsa Indonesia.

Pancasila memang sedang mengalami ujian dan perdebatan. Proses ini justru dapat semakin mendewasakan Pancasila sebagai sebuah ideologi alternatif dunia di saat ideologi-ideologi lain sudah

mengalami kebangkrutan. Namun untuk memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi pemersatu bangsa Indonesia, seluruh komponen dan elemen bangsa Indonesia harus mau mempelajari, memahami, dan mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, banyak elemen bangsa ini yang masih belum menganggap urgensi dan peran strategis Pancasila. Oleh sebab itu, upaya revitalisasi Pancasila di ruang publik sebetulnya menjadi sebuah keniscayaan.

Tulisan sederhana ini mencoba menguraikan pandangan ormas-ormas Islam khususnya yang ada di Surakarta mengenai revitalisasi Pancasila di ruang publik. Pandangan ormas Islam ini diwakili oleh tokoh-tokohnya dan juga sepak terjang organisasinya yang dapat terekam di dalam berbagai media seperti cetak, elektronik, hasil riset, hasil seminar dan lain-lain.

Pancasila di Era Reformasi

Reformasi adalah perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Dalam konteks sejarah politik di Indonesia, reformasi adalah era pasca kejatuhan Orde Baru tepatnya sekitar tahun 1997. Dampak dari tumbanganya Orde Baru dan lahirnya Orde Reformasi adalah bahwa kran demokrasi yang selama Orde Baru tersumbat menjadi lancar dan bahkan ibarat air mengalir dengan sangat deras. Perubahan yang sangat luar biasa dalam segala bidang, di antaranya adalah dalam bidang politik. Jika pada masa Orde Baru, Pancasila menjadi ideologi satu-satunya, Era Reformasi memberikan kebebasan untuk menggunakan ideologi lain selain Pancasila. Ormas dan partai-partai Islam banyak yang akhirnya mengubah ideologi Ormas dan Partainya menjadi berasaskan Islam.

Menurut aktivis ormas dan partai Islam, menjadikan Pancasila sebagai sebagai azas tunggal pada masa Orde Baru adalah suatu pemaksaan dan pendzoliman dan ketika di Era Reformasi malah ingin kembali menjadikan Pancasila sebagai azas tunggal itu adalah satau kemunduran. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Amir Mahmud, seorang pengamat politik dan pakar pergerakan Islam serta tokoh FUJAMAS (Forum Ukhuwah Jama'ah Masjid Surakarta). Pernyataannya ini berkaitan dengan keinginan pemerintah untuk merevisi UU Ormas. Jika hal itu sampai terwujud maka berarti kampanye kaum kafirin atas nama perang terhadap terorisme dengan

berbagai pressure seperti dihentikannya aliran dana, tidak diizinkan berdirinya lembaga pendidikan dan yang lainnya, telah berhasil memberikan rasa takut terhadap ormas-ormas Islam.¹

Anehnya justru Pancasila di era Reformasi ini banyak dipersoalkan oleh sejumlah anak bangsa dan bahkan dijadikan kambing hitam sebagai penyebab terjadinya keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.² Mereka tidak sadar bahwa Pancasila adalah energi besar bangsa Indonesia yang bekerja dan berproses secara otomatis untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Ketika terjadi bencana besar seperti gempa (Jogja) dan tsunami (Aceh), justru masyarakat Indonesia kembali menemukan Pancasila yang hilang, Persatuan Indonesianya muncul, Kemanusiaan yang adil dan beradabnya menegemuka. Hal itu terbukti dengan bahu membahunya masyarakat Indonesia tanpa melihat latar belakang agama, etnis, sukunya mengumpulkan dana, mengirimkan bantuan, tenaga kepada saudara-saudaranya sebangsa yang sedang ditimpa musibah.

Apa yang terjadi di Indonesia kaitannya dalam penanganan musibah tidak terjadi di negara lain yang sama-sama negara berkembang apalagi di negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat. Badai tornado yang memporak porandakan sebagian negara bagian di Amerika Serikat tidak kemudian mendorong warga di belahan negara bagian yang lain untuk bahu membahu saudara saudaranya yang sedang ditimpa musibah. Bagi warga Amerika Serikat, tugas untuk membantu warga yang sedang ditimpa bencana adalah tugas negara, tugas pemerintah, tentara dan Polisi serta pemadam kebakaran.

Energi Pancasila juga muncul kaitannya dengan maraknya konflik yang terjadi di berbagai daerah seperti konflik Ambon, Poso, Sambas, dan lain-lain. Warga akhirnya sadar bahwa mereka bersaudara meskipun berbeda agama, berbeda etnis, berbeda suku, berbeda latar belakang lainnya, mereka sepakat untuk kembali kepada Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Oleh sebab itu, muncul Perjanjian

¹ Widad, "Asas Tunggal Pancasila Jadi Kampanye Kafirin Berkedok Perang Terorisme", *voa-islam.com*, 2012.

² As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslabatan Berbangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2010), hlm. xii.

Malino II, di Aceh konflik juga bisa diakhiri dengan manis, dan sebagian warga Aceh yang awalnya berniat untuk memisahkan diri akhirnya kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Energi Pancasila seperti itu tidak bisa diketemukan di Balkan, Suriah, Moro, sebagian besar negara Afrika yang terlibat konflik. Mereka masih berkuat dengan perang saudara yang tidak berkesudahan entah sampai kapan mereka bisa menemukan kalimatun sawa' (Pancasila) seperti Indonesia. Padahal kebanyakan dari negeri-negeri yang berkonflik itu homogen baik secara agama, etnis maupun suku, berbeda dengan Indonesia yang sangat beragam baik agama, etnis, suku, bahasanya.

Meskipun sebagian anak bangsa mempersoalkan Pancasila, untungnya bangsa Indonesia memiliki kekuatan dua ormas Islam terbesar yaitu Muhammadiyah dan terutama Nahdlatul Ulama' yang telah secara bulat menerima dan menganggap Pancasila adalah final sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dua ormas ini secara konsisten sejak era sebelum kemerdekaan hingga saat ini telah menerima Pancasila dan menjadikannya sebagai azas organisasinya.

Di Era Reformasi ini, menurut As'ad Said Ali, pertama, Pancasila harus dikembangkan sebagai kontrak sosial dan bukan sebagai ideologi. Dalam wacana ini Pancasila diartikan sebagai norma-norma yang disepakati bersama sebagai dasar kehidupan sosial dan kenegaraan Indonesia merdeka. Kedua, Pancasila diwacanakan sebagai ideologi kebangsaan. Maksudnya bahwa Pancasila diartikan sebagai identitas kebangsaan dan keindonesiaan atau ciri kultural masyarakat Indonesia atas dasar mana negara Indonesia dibentuk. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dianggap sebagai perangkat nilai yang mampu menjadi perekat sosial sekaligus preferensi ideal yang seharusnya dipelihara dan diperjuangkan dalam bidang sosial, politik, dan budaya. Ketiga Pancasila diwacanakan sebagai visi bangsa dan negara. Pancasila adalah cita-cita dan harapan yang hendak diraih, bukan kondisi faktual saat ini. Keempat, wacana untuk meletakkan Pancasila sebagai konsepsi politis atau ideologi negara, sehingga dia hanya berlaku di ruang publik dan atau di dalam domain politik.³

³ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila...*, hlm.

Gambaran Sosio-Religi-Kultural Masyarakat Surakarta

Surakarta atau Solo atau Sala adalah wilayah otonom dengan status kota di bawah Propinsi Jawa Tengah. Penduduknya sekitar 503.421 dan kepadatan penduduknya sekitar 13.636/km². Kota ini memiliki luas 44 km² berbatasan dengan kabupaten Karanganyar dan kabupaten Boyolali di sebelah utara, kabupaten Karanganyar dan kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Surakarta merupakan pewaris Kesultanan Mataram yang dipecah melalui Perjanjian Giyanti pada tahun 1755.

Nama Surakarta diberikan sebagai nama “wisuda” bagi pusat pemerintahan baru Mataram, meskipun ada catatan lain menyebut nama Salakarta.⁴ “Sala” adalah satu dari tiga dusun yang dipilih oleh Sunan Pakubuwana II atas saran dari Tumenggung Hanggawangsa, Tumenggung Mangkuyudan, serta komandan pasukan Belanda, J.A.B van Hohendorff, ketika akan mendirikan istana baru, setelah perang suksesi Mataram.

Eksistensi kota Surakarta dimulai di saat Sunan Pakubuwana II, raja Kesultanan Mataram, memindahkan kedudukan raja dari Kartasura ke Desa Sala, sebuah desa yang tidak jauh dari tepi Bengawan Solo, karena istana Kartasura hancur akibat serbuan pemberontak. Sunan Pakubuwana II membeli tanah dari lurah Desa Sala, yaitu Kyai Sala, sebesar 10.000 ringgit (gulden Belanda) untuk membangun istana Mataram yang baru. Secara resmi, istana Mataram yang baru dinamakan Keraton Surakarta Hadiningrat dan mulai di tempati tanggal 17 Februari 1745. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Surakarta. Perjanjian Giyanti yang ditanda-tangani oleh Sunan Pakubuwana III, Belanda, dan Pangeran Mangkubumi pada 13 Februari 1755 membagi wilayah Mataram menjadi dua yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Selanjutnya wilayah Kasunanan

⁴ Lihat Ann Kumar, *Javaness Court Society and Politics in the late Eighteenth Century: the Record of a Lady Soldier*, 1980, Part I, hlm. 1-46.

Surakarta semakin berkurang, karena Perjanjian Salatiga yang diadakan pada 17 Maret 1757 menyebabkan Raden Mas Said diakui sebagai seorang pangeran merdeka dengan wilayah kekuasaan berstatus kadipaten, yang disebut dengan nama Praja Mangkunegaran. Sebagai penguasa Mangkunegaran, Raden Mas Said bergelar Adipati Mangkunegara I.

Surakarta atau lebih terkenal Solo merupakan sebuah kota yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya seperti Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Jakarta, Bandung dan lain sebagainya. Namun demikian, Surakarta memiliki keistimewaan yang barangkali tidak dimiliki oleh sebagian kota-kota yang lain. Meskipun kecil, Surakarta memiliki sejarah yang cukup tua, hampir semua pergerakan pernah ada dan muncul, berkembang serta mengalami kehancurannya di kota Surakarta. Pergerakan itu mulai dari yang paling kanan hingga yang paling kiri. Tokoh-tokoh pergerakan juga banyak yang lahir dan memulai perjuangannya di kota ini.

Perhimpunan dan partai politik yang pernah mengisi ruang-ruang kota Surakarta antara lain Boedi Oetomo, Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, Insulinde, Indische Partij, Partai Komunis Indonesia, dan Sarekat Ra'jat pada masa pra kemerdekaan atau pasca kemerdekaan awal. Di antara tokoh-tokoh yang pernah dilahirkan kota Surakarta adalah Haji Samanhudi, Marco Kartodikromo, Tjipto Mangoenkoesoemo, Haji Mohammad Misbach, dan lain-lain.⁵

Surakarta memang menarik sebagaimana digambarkan oleh Takashi Shiraishi bahwa sebelum kemerdekaan, Surakarta adalah satu-satunya pusat pergerakan di mana semua kekuatan sosial seperti pangeran dan bangsawan Jawa, pegawai bumiputera, intelektual bumiputera yang berpendidikan Barat, borjuasi bumiputera, orang-orang Islam dengan pendidikan pesantren, tukang, buruh, tani, orang-orang Indo, Cina, pegawai administrasi Belanda dan pengelola perkebunan Belanda, semuanya bergabung dalam pergerakan atau menjadi lawannya.⁶

Di era modern ini, kota Surakarta juga kurang lebih sama dengan kondisi pada masa pra kemerdekaan. Dengan kata lain,

⁵ Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, (Jakarta: Grafiti, 2005), hlm. 66.

⁶ *Ibid.*, hlm. xiv.

masyarakatnya masih sangat heterogen dengan afiliasi pergerakan dan politik yang sangat beragam. Di dalam Islam terdapat kelompok Islam moderat yang misalnya diwakili Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah, kelompok Islam garis keras yang dimotori oleh Abu Bakar Ba'asyir, kelompok Islam oportunistis seperti MTA, belum lagi Islam yang abangan juga cukup dominan. Kelompok non Muslim kebanyakannya adalah Katholik-Protestan, kemudian China yang sejak era kepemimpinan Presiden Gus Dur mereka diperbolehkan kembali ke agamanya semula yaitu Konghucu. Di samping itu, penghayat keagamaan dan Kejawan juga ada di kota Surakarta, apalagi Surakarta masih memiliki kerajaan.

Dari segi etnis, Surakarta juga cukup heterogen, meskipun mungkin masih lebih heterogen Jogjakarta dan Jakarta. Etnis yang dominan, selain Jawa adalah China dan Arab. Bahkan ada dua pasar yang diidentikkan dengan kedua etnis tersebut, yaitu pasar Klewer yang didominasi etnis Arab⁷ dan pasar Gede yang didominasi etnis China.⁸ Dengan heterogennya masyarakat Surakarta ini, maka tidak heran saat ini wali kota Solo dipegang oleh seorang Kristen, tidak hanya sebagai pengganti Jokowi yang hijrah ke Jakarta menjadi Gubernur selanjutnya Presiden, tetapi juga menang dalam pemilihan langsung oleh rakyat Surakarta.

Keragaman dan kebhinekaan masyarakat Surakarta pada satu sisi merupakan sebuah kekuatan, kelebihan dan keistimewaan jika mampu dikelola dengan baik, tetapi pada sisi yang lain, hal itu merupakan potensi konflik yang luar biasa yang suatu saat bisa meledak, ibaratnya seperti api dalam sekam apabila masyarakat dan pemimpin-pemimpinnya tidak *aware* terhadap potensi ancaman yang membayangi kota Surakarta.

Di tengah masyarakat yang heterogen dan beragam ini diperlukan sebuah ideologi pemersatu (*kalimatin sama*) yang mampu mempertemukan berbagai ideologi, agama, etnis dan berbagai latar belakang lainnya dalam satu visi misi yang sama, selaras, dan harmonis. Jika tidak maka perang sesama anak bangsa seperti yang terjadi di berbagai belahan dunia sekarang ini bukan tidak mungkin

⁷ Pola pergerakan masyarakat etnis Arab di Surakarta, lib.ui.ac.id.

⁸ Baca Benny Juwono, *Etnis Cina di Surakarta 1890-1927: Tinjauan Sosial Ekonomi*, i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?id

akan mencabik-cabik keragaman dan kebhinekaan sebuah masyarakat. Itulah misalnya yang dialami masyarakat Suriah, Irak, Philipina Selatan, dan lain sebagainya.

Sejak awal reformasi, perbincangan mengenai ideologi Pancasila agak merosot tajam. Penyebabnya barangkali karena selama Orde Baru Pancasila digunakan untuk kepentingan politik pemerintah Orde Baru, kewenangan mendefinisikan, menafsirkan, dan menjabarkan Pancasila sepenuhnya dimonopoli oleh pemerintah Orde Baru, tidak ada keterlibatan umum. Orang mungkin sudah lelah memperbincangkan Pancasila, tapi belakangan ketika ideologi-ideologi transnasional berdatangan ke Indonesia dan mulai merusak sendi-sendi kebangsaan, maka orang mulai melirik kembali Pancasila sebagai ideologi genuin milik bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana perbincangan Pancasila di ruang publik saat ini. Untuk kepentingan tersebut, peneliti mencoba menelisik bagaimana Pancasila diperbincangkan dalam ruang publik dalam perspektif organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam di Surakarta. Peneliti melakukan observasi langsung dan mewawancarai beberapa simpul tokoh masyarakat yang aktif di berbagai organisasi sosial keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, MUI, MTA, pengasuh pesantren, pimpinan perguruan tinggi dan lain-lain.

Pandangan Ormas Islam Surakarta terhadap Pancasila di Ruang Publik

Indonesia dengan masyarakatnya yang sangat beragam sangat beruntung memiliki founding fathers bangsa yang sedari awal menyadari keragaman yang dimiliki bangsanya, sehingga mereka telah meletakkan dan merumuskan suatu ideologi pemersatu yang mampu mempertemukan berbagai perbedaan yang ada. Ideologi itu adalah Pancasila. Pancasila bukanlah agama, dan ia tidak mungkin menjadi agama karena bangsa Indonesia telah memiliki agamanya sendiri yang diakui yaitu Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Pancasila adalah ideologi yang tidak bertentangan dengan agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia, dengannya masyarakat Indonesia menjalani kehidupan kebangsaan dan kenegaraannya.

Namun demikian, bukan berarti Pancasila tidak menghadapi tantangan dalam menjaga kebhinekaan bangsa ini. Penentangan dan

pemberontakan pernah muncul di negeri ini pada masa-masa awal berdirinya bangsa ini. Pemberontakan DI/TII, Pemberontakan G30S/PKI, pemberontakan Kartosuwirjo dan Daud Beureuh, dan pemberontakan PRRI/Permesta merupakan contoh ancaman yang pernah dihadapi Pancasila. Di era modern ini, ancaman dan tantangan terhadap Pancasila bukan berarti tidak ada, ancaman seperti bentuk lama juga masih ada yaitu usaha-usaha untuk mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain seperti yang diperjuangkan GAM (sudah berakhir), Hizbut Tahrir Indonesia (sudah dibubarkan), RMS dan OPM di Papua. Ancaman bentuk lainnya adalah terorisme, korupsi, kekerasan dan konflik berbau SARA.

Dalam konteks Surakarta, ancaman terhadap Pancasila dalam bentuk radikalisme dan terorisme salah satunya adalah dengan terindikasinya beberapa mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan jaringan Negara Islam Indonesia (NII) di Jawa Timur. Lima teroris yang ditembak mati di Bali merupakan jaringan teroris di Surakarta dan pelaku perampokan Bank CIMB Medan. Belum lagi pengeboman di kota Surakarta yang dilakukan oleh kelompok Cirebon. Kemudian penelitian CSRC menyimpulkan bahwa beberapa masjid di Surakarta memiliki level radikalisme yang tinggi dan merupakan masjid-masjid yang terkenal eksklusif serta berafiliasi dengan ormas Islam garis keras, yakni masjid Gumuk LPIS dan Al-Kahfi Hidayatullah.

Ancaman terhadap Pancasila bukan semakin surut tetapi justru semakin banyak dan beragam. Laporan penelitian Kemendikbud selama Juli-September 2016 menunjukkan data-data yang cukup mengagetkan kita semua sebagai anak bangsa. Penelitian itu menyatakan bahwa 8,2 persen pelajar menolak ketua OSIS dari agama berbeda, 23 persen responden merasa lebih nyaman dipimpin oleh seseorang yang satu agama. 85 persen setuju dasar negara diganti dengan agama dan 7,2 persen setuju eksistensi gerakan ISIS.

Riset yang hampir sama dilakukan oleh Setara Institute pada tahun 2015 di kota Jakarta dan Bandung. Hasilnya 8,5 persen responden setuju jika dasar negara Pancasila diganti dengan aturan agama. Kemudian Setara pada tahun 2010 juga melakukan survey yang hasilnya menunjukkan bahwa 35 persen responden anak muda Indonesia mendukung khilafah Islamiyah sebagai sistem politik baru. Kecenderungan ini tujuh tahun berikutnya terus menunjukkan peningkatan.

Fakta-fakta ini tentu menjadi tantangan bagi Pancasila sebagai ideologi pemersatu yang menjadi pijakan semua latar belakang etnis, agama, ideologi, dan kepentingan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Tentu jika kondisi seperti ini dibiarkan Pancasila akan hilang dari hati dan pikiran bangsa Indonesia. Kekhawatirannya adalah keharmonisan yang terjalin di atas beragamnya latar belakang akan pudar dan lambat laun Indonesia akan memasuki fase perpecahan dan disintegrasi bangsa yang begitu menakutkan dengan berkaca kepada bangsa-bangsa yang pernah merasakannya seperti Balkan.

Oleh karena itu, di tengah ancaman dan tantangan terhadap Pancasila ini menjadi penting dan urgen untuk *resounding* Pancasila terutama di ruang-ruang publik. Di Surakarta organisasi sosial keislaman yang sangat aktif menyuarakan Pancasila pada ruang publik adalah Nahdlatul Ulama'. Bahkan beberapa waktu yang lalu seluruh kader penggerak Nahdlatul Ulama' seluruh daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI. Yogyakarta berkumpul di Tawangmangu Karanganyar untuk menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus dibela. Dalam ruang-ruang publik lainnya seperti pengajian, pelatihan, rapat, bahtsul masail dan lain-lain, Nahdlatul Ulama' selalu menyuarakan pentingnya Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Karena begitu gigih dan aktifnya Nahdlatul Ulama' ini sehingga organisasi lain secara sinis menganggap bahwa NU yang paling Pancasila, yang paling berhak menafsirkan Pancasila dan yang paling membela NKRI dengan slogannya NKRI harga mati, sementara yang lain dianggap kurang Pancasila.

Jika merunut jauh ke belakang, Nahdlatul Ulama' telah melakukan proses dialog yang sangat panjang dengan Pancasila dan NKRI yang pada akhirnya berujung pada kesimpulan bahwa bagi NU Pancasila adalah sudah final dan NKRI harga mati. Berawal dari Mukhtamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin tahun 1936 yang membuat keputusan yang sangat unik, yang nantinya akan melandasi sikap NU terhadap ideology, politik, dan pemerintahan di Indonesia. Terhadap status tanah Hindia Belanda yang diperintah oleh pemimpin non Muslim saja apabila diganggu pihak luar, NU mewajibkan untuk membela dan mempertahankannya. Apalagi setelah Indonesia merdeka dan dipimpin oleh orang Indonesia sendiri Muslim lagi, maka tentu hukum membela dan mempertahankannya jauh lebih wajib.

Penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai ideologi nasional dalam kehidupan kolektif bangsa secara keseluruhan setelah keharusan mempertahankan nusa-bangsa, kemudian negara dan pemerintahannya, kemudian dilanjutkan dengan menjadikan ideologi tersebut sebagai asas bagi semua organisasi politik dan kemasyarakatan. Penerimaan atas Pancasila sebagai asas itu juga dilakukan secara keagamaan, dalam arti mendudukkan agama dan Pancasila pada tempat masing-masing, tanpa harus dipertentangkan. Antara Pancasila sebagai landasan ideologis –konstitusional dan akidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal-Jama'ah sebagai landasan keimanan, tidak dapat dipertentangkan, karena pada hakikatnya orang berasas Pancasila karena kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dengan demikian mengambil salah satu dasar dalam Pancasila, sedangkan berakidah adalah tindakan mengkongkretkan Pancasila dalam salah satu bidang kehidupan bangsa, yaitu kehidupan beragama.⁹

Pemahaman semacam ini merata di kalangan warga Nahdliyyin baik yang ada di jajaran pengurus (pusat dan daerah) maupun nahdliyyin non struktural dan kultural, termasuk dipahami oleh pengurus NU di Surakarta. Dengan pemahaman yang semacam ini, Nahdlatul Ulama' Surakarta justru bisa dekat dengan kelompok-kelompok abangan dan bahkan non-muslim, tetapi pada saat yang sama justru kurang disukai oleh organisasi Islam lainnya. Sikap dan pemahaman NU yang sebenarnya moderat membuat dia berada di tengah dua kelompok yaitu Islam 'kanan' pada satu sisi dan abangan/non muslim pada sisi yang lain. Karena sikapnya yang demikian, NU banyak dicaci, dianggap munafiq, dan oportunistis. Tapi

⁹ NU juga mendasarkan segala perilaku sosial politiknya kepada pertimbangan beberapa kaidah fikih. Kaidah-kaidah itu adalah: *pertama, ma la yudraku kullub la yutraku kullub*; berarti kewajiban yang tidak mungkin diwujudkan secara utuh tidak boleh ditinggalkan semuanya. Kaidah *kedua* adalah *dar' al mafasid muqaddam ala jalb al masalih*, artinya mendahulukan upaya menghindari bahaya atau kerusuhan daripada melaksanakan kemaslahatan yang mengandung resiko lebih besar. Kaidah *ketiga* ialah *idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zamuha dararan bi irtika bi akhaffihima*; artinya apabila terjadi kemungkinan komplikasi bahaya maka dipertimbangkan bahaya yang paling kecil resikonya. Yang *terakhir* kaidah *al bukmu yaduru ma'a illatibi wujudan wa'adaman*; hukum tergantung kepada *'illatnya* (rasio legisnya). Lihat M. Ali Haidar, *Nabdhatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih Dalam Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1994), hlm. 321-323.

bagi NU tidak masalah NU dicaci, tokoh-tokoh NU dihujat, asal tidak bangsa ini, negara ini, maka bagi NU siapapun yang ingin merongrong dan mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia akan berhadapan dengan NU. NU memang agak keras terhadap kelompok-kelompok yang anti terhadap Pancasila dan NKRI.

Dengan pandangan dan sikap seperti di atas, NU terkesan politis dan aktif bahkan agresif jika berkaitan dengan Pancasila dan NKRI. Apalagi tuduhan tersebut diperkuat dengan fakta bahwa saat ini NU sangat dekat dengan kekuasaan. Namun jika kita pelajari sepak terjang NU dari dahulu sebetulnya NU tetap konsisten kalau itu berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan terlepas dia sedang dekat dengan pemerintah atau justru berlawanan dengan pemerintah. Perlu diingat pula bahwa karena karakteristiknya yang moderat, NU dalam sepanjang sejarahnya tidak pernah sekalipun punya niatan apalagi mewujudkan dalam tindakan untuk melakukan pengkhianatan atau pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah meskipun pemerintahan tersebut memusuhi NU seperti pada masa Orde Baru.

Agak berbeda dengan pandangan NU mengenai Pancasila, Persarikatan Muhammadiyah Surakarta kelihatannya agak pasif, Muhammadiyah lebih menitikberatkan kepada pengamalan Pancasila terutama dalam bidang pendidikan dan sosial (kesehatan). Jargon apakah cinta Pancasila dan NKRI bagi Muhammadiyah kurang begitu penting, yang penting adalah pengamalannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, Muhammadiyah juga sama dengan NU dalam hal bahwa Pancasila dan NKRI adalah final dan harga mati.

Menurut Muhammadiyah, Pancasila dan NKRI adalah hasil dari musyawarah dan kesepakatan bersama, Indonesia adalah *Darul 'Abdi wa asy-Syabadah*. Negara Pancasila sebagai *Darul Abdi Wa asy-Syabadah* telah diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 pada 3-7 Agustus 2015 di Makassar. *Darul abdi* artinya negara tempat kita melakukan konsensus nasional. Negara kita berdiri karena seluruh kemajemukan bangsa, golongan, daerah, kekuatan politik, sepakat untuk mendirikan Indonesia. Sedangkan *darul asy-syabadah* artinya negara tempat kita mengisi. Jadi setelah kita punya Indonesia yang merdeka, maka seluruh elemen bangsa harus mengisi bangsa ini menjadi negara yang maju, makmur, adil bermartabat.

Indonesia adalah tempat untuk membuat perjanjian, tempat untuk membangun negeri ini bersama. Di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar (MAD) Muhammadiyah dinyatakan bahwa prinsip-prinsip nilai Pancasila merupakan landasan masyarakat sejahtera, makmur dan bahagia sebagaimana dicita-citakan Muhammadiyah. Nilai-nilai tersebut dinyatakan Muhammadiyah sebagai prinsip keadilan, kejujuran, persatuan dan hukum Allah. Rumusan dalam MAD kemudian dipertegas 11 tahun kemudian oleh *Kepribadian Muhammadiyah* terutama pada pokok pikiran keempat yang merumuskan pola perialku Muhammadiyah dalam hidup sosial.

Di samping itu, menurut Muhammadiyah, Indonesia adalah tempat untuk membuat kesaksian. Kesaksian dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, terbukti rumah sakit Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah juga terbuka untuk umum, untuk seluruh anak bangsa. Sikap Muhammadiyah terhadap kelompok-kelompok yang anti terhadap Pancasila, seperti kelompok yang menyatakan bahwa Pancasila, NKRI, pemerintah adalah taghut memang agak lunak, paling jauh cara yang ditempuh adalah misalnya dengan cara dialog dan saling menghargai.¹⁰

Sikap Muhammadiyah yang seperti di atas memang cenderung pasif, praktis dan pragmatis. Secara kelembagaan maupun secara individu agak kurang kelihatan agresifitas usaha-usaha Muhammadiyah secara ideologis untuk menyuarakan Pancasila di ruang publik. Pancasila mereka cukupkan hanya di dalam kurikulum sekolah-sekolah Muhammadiyah yang juga mengikuti kurikulum nasional. Terhadap kelompok-kelompok yang anti terhadap Pancasila, Muhammadiyah agak bersikap lunak, lebih cenderung memilih cara-cara dialogis, sehingga tidak heran, sikap Muhammadiyah yang semacam ini membuat warga Muhammadiyah menjadi incaran kelompok-kelompok radikal dan anti Pancasila. Sikap Muhammadiyah terhadap wali kota Solo yang non muslim juga dilematik. Bagi Muhammadiyah, pemimpin non muslim itu masalah terlepas apakah dia memiliki kinerja yang baik dan adil. Muhammadiyah masih berpegangan kepada tafsir bahwa pemimpin harus muslim.¹¹

¹⁰ Hasil wawancara dengan ust Sholahuddin, pengurus Muhammadiyah Sukoharjo dan pengasuh pondok pesantren, pada tanggal 5 Desember 2017.

¹¹ *Ibid.*

Selain NU dan Muhammadiyah, di Surakarta juga berkembang Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) pimpinan ustadz Sukino. Organisasi ini memiliki kekuatan di jaringan media seperti televisi dan radio. Pengajian-pengajian yang berlangsung selalu direly melalui media televisi dan radio milik mereka. Sebagian besar yang ikut organisasi ini adalah warga yang lebih condong ke Muhammadiyah dan abangan.

Sikap dan pandangan MTA terhadap Pancasila sebenarnya kurang lebih sama dengan Muhammadiyah, namun organisasi ini karena mungkin massanya masih sedikit sehingga terkesan oportunistis. Pada pengajian-pengajian yang sering mereka adakan, sering sekali mengkritik Pancasila, UUD 1945, NKRI dan kebhinnekaan, dan juga pemerintah. Tetapi pada waktu yang lain, organisasi ini mengundang Presiden Jokowi misalnya dan bermanis-manis kata di hadapannya. Sikap seperti ini bisa dimaklumi karena pada satu sisi basis anggota MTA memang lebih condong ke 'kanan' tapi mereka membutuhkan support pemerintah untuk 'menghidupi' organisasinya.

Jadi hampir tidak kita jumpai sikap dan kegiatan MTA dalam rangka ideologisasi Pancasila atau menyuarakan Pancasila di ruang-ruang publik sebagai ideologi pemersatu bangsa. Sikap yang sama juga ditunjukkan terhadap gerakan-gerakan yang anti Pancasila seperti HTI, MMI, dan JAT. Sikap mereka cenderung lunak dan bersahabat. Pembicaraan mereka di ruang publik lebih banyak berisi tentang diskusi penafsiran keagamaan mereka dan anti pemerintahan Jokowi.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surakarta yang terdiri dari beberapa organisasi keislaman, sikap dan pandangannya tergantung kepada siapa yang menjadi pemimpin (ketua)nya, sekarang ketuanya dipegang orang dari Muhammadiyah, sebelumnya berasal dari MTA. MUI Surakarta tidak atau kurang memiliki usaha-usaha untuk menyuarakan Pancasila di ruang publik sebagai ideologi pemersatu bangsa. Malah selama beberapa tahun terakhir MUI Surakarta seakan berseberangan dengan pemerintah baik lokal Surakarta maupun pusat. Apalagi setelah Jokowi hijrah ke Jakarta dan Solo digantikan oleh FX. Hadi Rudyatmo yang beragama Kristen hingga masa jabatannya berakhir. Ketidaksukaan MUI Surakarta terhadap pemimpin non Muslim terus berlanjut, manakala

FX Hadi Rudyatmo secara mengejutkan juga menang di pilkada langsung dan kembali menjadi Wali kota Solo.¹²

Sikap dan pandangan MUI terhadap gerakan-gerakan yang anti Pancasila dan NKRI juga lemah bahkan cenderung mendukung. Tentu ini menjadi masalah karena bagaimanapun juga MUI di semua levelnya masih didanai oleh pemerintah. Tanpa bantuan dari pemerintah, saya kira MUI tidak akan bisa berjalan dengan baik karena begitu besarnya ketergantungan terhadap dukungan pendanaan pemerintah. Di samping itu, mereka tidak memiliki basis massa yang jelas sebagaimana organisasi-organisasi lainnya seperti NU, Muhammadiyah, MTA dan lain-lain.¹³

Terakhir sikap dan pandangan organisasi-organisasi yang masuk kategori anti Pancasila seperti HTI, FPI, MMI, dan JAT. Empat organisasi ini juga ada dan berkembang di Solo-Surakarta. Secara historis, kemunculan ormas-ormas tersebut awalnya dapat dilacak dari adanya ide Negara Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dengan tokoh utama, SM. Kartosuwiryo. DI/TII diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Jawa Barat. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara berdasarkan Islam dan SM Kartosuwiryo sebagai imamnya.¹⁴ Pada tanggal 20 Januari 1952, DI/TII Kartosuwiryo mendapat dukungan dari Kahar Muzakkar dan pasukannya yang bermarkas di Sulawesi, kemudian pada atanggal 21 September 1953, Daud Beureueh di Aceh juga menyatakan bagian dari NII Kartosuwiryo. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar dan pasukannya yang bermarkas di Kalimantan Selatan juga menggabungkan diri.¹⁵ Pada akhirnya, gerakan ini berhasil ditumpas oleh militer pro pemerintah dan tidak pernah lagi muncul kecuali melalui gerakan bawah tanah.

¹² Hasil wawancara dengan bapak Ismail Yahya, pengurus MUI Solo dan Karanganyar dan juga aktif di DMI, pada tanggal 5 Desember 2017.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Baca selengkapnya tentang DI/TII; C Van Dijk, *Rebellion Under the Banner of Islam; The Darul Islam in Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981)

¹⁵ A. Yani Anshori, "Wacana Siyasah Syar'iyah di Indonesia; Belajar Lebih Bijak" *Makalah* pada Seminar Nasional "Politik Hukum Islam di Indonesia" (Yogyakarta: Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 21.

Angin reformasi, terutama setelah Presiden Habibie mencabut peraturan tentang indoktrinasi asas tunggal Pancasila, membawa angin segar bagi kembalinya gerakan serupa meskipun dengan format yang berbeda. Beberapa gerakan Islam baru muncul seperti jamur di musim hujan, misalnya FPI (Front Pembela Islam), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), Laskar Jihad, FKAWJ (Forum Komunikasi Ahlu Sunnah wa al-jama'ah), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), FPIS (Front Pemuda Islam Surakarta), Hizbullah Sunan Bonang, Laskar Jundullah, dan lain sebagainya.

Gerakan tersebut tidak muncul begitu saja setelah reformasi bergulir, namun ada proses yang panjang dan berliku yang harus ditempuh. Pada tahun 1980, generasi baru DI muncul dengan berbagai faksi yang tersebar di berbagai wilayah, yaitu: 1) faksi Atjeng Kurnia meliputi Bogor, Serang, Purwakarta, dan Subang, 2) faksi Ajengan Masduki meliputi Cianjur, Purwokerto, Subang, Jakarta, dan Lampung 3) faksi Abdul Fatah Wiranagapati meliputi Garut, Bandung, Surabaya, dan Kalimantan 4) faksi Gaos Taufik meliputi seluruh Sumatera 5) faksi Abdullah Sungkar meliputi Jawa Tengah dan Yogyakarta 6) faksi Ali Hate meliputi Sulawesi Selatan, dan 7) faksi Komandemen wilayah IX dipimpin Abu Toto Syech Panji Gumilang.¹⁶

Abdullah Sungkar sebelum bergabung dengan NII telah mendirikan sebuah kelompok yang diberi nama "Jama'ah Islamiyyah". Kelompok ini anggotanya terdiri dari para veteran pejuang yang sudah pulang dari jihad berperang antara Afganistan dan Rusia. Reuni veteran yang dilatih secara militer oleh komando pasukan khusus USA dan CIA tersebut bersepakat membentuk kelompok yang disinyalir memiliki kaitan khusus dengan al-Qaeda. Strategi Jama'ah Islamiyyah terdiri dari 3 unsur, yaitu: Imam, hijrah, dan jihad. Bentuk dari ketiga strategi itu adalah dimilikinya 3 kekuatan, yaitu: kekuatan akidah, kekuatan persaudaraan, dan kekuatan militer.¹⁷

MMI yang diketuai oleh ust. Abu Bakar Baasyir pada awalnya adalah organ pecahan dari Jamaah Islamiyah Asia Tenggara pimpinan Abdullah Sungkar. Dikarenakan berbeda pandangan dengan

¹⁶ S. Yunanto, *et. al.*, *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara* (Jakarta: The Ridep Institute, 2003), hlm. 64.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 65.

Abdullah Sungkar, akhirnya Abu Bakar Baasyir mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), nantinya Abu Bakar Baasyir juga berselisih pendapat dengan Muhammad Siddiq al-Jawi, sehingga MMI dipimpin oleh Muhammad Siddiq al-Jawi, sedangkan Abu Bakar Baasyir mendirikan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT). HTI lebih banyak berkembang di kalangan akademisi seperti dosen dan mahasiswa. Sedangkan FPI yang secara ideologi dan kultur lebih dekat ke NU banyak diminati oleh orang-orang NU ‘abangan’ dan mantan preman yang ketike belajar agama mendapatkan tempat istimewa untuk tetap melanjutkan premanismenya dengan berlindung di balik agama. Empat organisasi itu ketemu pada satu tujuan yang sama yaitu mendirikan khilafah atau Daulah Islamiyyah (*iqamat al-daulah al-Islamiyyah*) dengan penerapan syariat Islam pada ranah publik.¹⁸

Klasifikasi tersebut di atas dibuat berdasarkan pada perspektif sosiologis. Namun jika kita menggunakan perspektif politis, bisa saja seperti yang disuarakan oleh Rektor IAIN Surakarta bahwa ada banyak sekali corak dan kecenderungan. Menurut beliau, dalam konteks Surakarta ada ormas/partai kanan yang kritis terhadap pemerintah seperti PKS, FPI, ada kelompok moderat yang juga kritis terhadap pemerintah seperti Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama’ yang moderat tapi cenderung selalu mendukung pemerintah, ada juga kelompok oportunistis seperti MTA. Semua ormas tersebut di atas masih bisa menerima Pancasila, tapi kritis terhadap pemerintah dan anti asing. Sementara HTI adalah ormas yang anti Pancasila kritis terhadap pemerintah dan anti asing. Jadi, terkadang anti Pancasila atau tidaknya tergantung siapa yang menggunakan dan untuk kepentingan apa.¹⁹

Kesimpulan

Jika disimpulkan dari pembahasan di atas, terdapat beberapa klasifikasi pandangan ormas Islam di Surakarta terhadap resonansi Pancasila di ruang publik yang bisa peneliti kemukakan. Klasifikasi pertama adalah ormas Islam yang dapat menerima Pancasila dan

¹⁸ A. Maftuh Abegebriel, A. Yani Abeveiro SR-Ins Team, *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia* (Jogjakarta: SR-Ins Publishing, 2004).

¹⁹ Wawancara dengan rektor IAIN Surakarta, pada tanggal 5 Desember 2017.

secara sungguh-sungguh menyuarakan urgensi Pancasila di ruang publik sebagai ideologi yang final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, kelompok ini juga sangat lantang menentang kelompok-kelompok yang anti Pancasila meskipun sesama ormas Islam, sehingga kadang ormas lainnya menganggapnya munafiq dan bahkan kafir karena mau menerima Pancasila yang dianggap taghut. Organisasi tersebut adalah Nahdlatul Ulama' Surakarta.

Klasifikasi kedua adalah ormas Islam yang sudah bisa menerima Pancasila dan menganggapnya sudah final sebagai ideologi berbangsa dan bernegara tetapi cenderung passif untuk menyuarakan Pancasila di ruang publik dan juga diam menghadapi kelompok-kelompok yang anti Pancasila. Ormas ini lebih fokus mengurus sekolah dan rumas sakitnya ketimbang ideologi. Ormas tersebut adalah Muhammadiyah Surakarta.

Klasifikasi ketiga adalah ormas anti Pancasila. termasuk di dalam klasifikasi ini adalah HTI, FPI, MMI, JAT Surakarta. Perbedaannya adalah HTI ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Khilafah, sedangkan FPI, MMI, JAT ingin menerapkan syari'at Islam dalam wilayah publik. Pada akhirnya tiga ormas terakhir ini juga bertemu pada tujuan dan cita-cita untuk mendirikan negara Islam.

Dengan demikian, mayoritas organisasi Islam di Solo-Surakarta sikap dan pandangannya terhadap Pancasila agak kurang menggembirakan. Kalau tidak anti minimal passif untuk menyuarakan Pancasila di ruang publik sebagai ideologi pemersatu bangsa. Mungkin hanya Nahdlatul Ulama' yang perannya sangat *ketoro* dalam memperjuangkan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa di ruang-ruang publiknya seperti pengajian, pelatihan, pengkaderan dan lain sebagainya. Untungnya dalam konteks Solo Raya NU memiliki pemimpin karismatik seperti Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf dengan Syecher Manianya yang tersebar tidak hanya di sekitar Solo tetapi bahkan daerah-daerah lain seperti Yogyakarta, Semarang (pantura) dan bahkan Jawa Timur.

Kabar baiknya lagi adalah bahwa di kota Surakarta terdapat komunitas-komunitas masyarakat yang berkembang dan mereka memiliki kegiatan-kegiatan dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila. Komunitas-komunitas tersebut antara lain Pasopatibismania, Milanisiti, Omah Budaya, Solo Mengajar, Cinta

Bumi, Blusukan Solo, Sepeda Onthel Lawas, Fotografi dan Hijabers. Kegiatan-kegiatan mereka merupakan bentuk penguatan Pancasila melalui jalur sosio-kultural.

Daftar Pustaka

- Abegebriel, A. Maftuh, A. Yani Abeveiro SR-Ins Team, *Negara Tuban; The Thematic Encyclopaedia*, Jogjakarta: SR-Ins Publishing, 2004.
- Ali, As'ad Said, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta: LP3ES, 2010.
- Anshori, A. Yani, "Wacana Siyasah Syar'iyah di Indonesia; Belajar Lebih Bijak" *Makalah* pada Seminar Nasional "Politik Hukum Islam di Indonesia" Yogyakarta: Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Dijk, C. Van, *Rebellion Under the Banner of Islam; The Darul Islam in Indonesia* The Hague: Martinus Nijhoff, 1981.
- Haidar, M. Ali, *Nabdhatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih Dalam Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1994.
- Juwono, Benny, *Etnis Cina di Surakarta 1890-1927: Tinjauan Sosial Ekonomi*, i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?d
- Kumar, Ann, *Javaness Court Society and Politics in the late Eighteenth Century: the Record of a Lady Soldier*, 1980.
- Pola pergerakan masyarakat etnis Arab di Surakarta, lib.ui.ac.id.
- Shiraishi, Takashi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: Grafiti, 2005.
- Widad, "Asas Tunggal Pancasila Jadi Kampanye Kafirin Berkedok Perang Terorisme", voa-islam.com, 2012.
- Yunanto, S., *et. al.*, *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara* Jakarta: The Ridep Institute, 2003.